

Anggota parlemen Asia Tenggara menyerukan perlawanan terhadap penggunaan agama sebagai senjata politik dan perlindungan minoritas

JAKARTA – Anggota parlemen harus menjunjung tinggi kebebasan beragama atau berkeyakinan dan bekerja untuk mencegah agama menjadi senjata politik di tengah meningkatnya konservatisme dan diskriminasi terhadap minoritas di seluruh dunia, kata dua belas anggota dan mantan anggota parlemen dari Asia Tenggara pada konferensi yang diadakan di Jakarta.

“Agama terlalu sering dijadikan sebagai senjata politik, terutama di tahun-tahun pemilu. Penting bagi anggota parlemen untuk saling terhubung dan mendiskusikan strateg untuk melawan taktik seperti itu, terutama dengan adanya pemilu dalam waktu dekat di Malaysia, Indonesia, serta Timor-Leste,” kata anggota parlemen Timor-Leste Antonio Benevides.

Dalam beberapa tahun terakhir, agama sering digunakan di kawasan Asia Tenggara untuk menyerang musuh politik. Salah satu contoh yang dibahas selama konferensi tersebut adalah pemilihan presiden 2019 di Indonesia, ketika para pendukung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto saling menukar tuduhan tentang keIslaman masing-masing kandidat.

Di Myanmar, militer dan partai proksinya, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), sering menuduh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) membahayakan agama Buddha dan disusupi oleh Muslim yang berencana untuk mengambil alih negara tersebut. Sekarang, junta militer yang menggulingkan pemerintah NLD dalam kudeta ilegal pada Februari tahun lalu mencoba menggunakan agama Buddha untuk melegitimasi kekuasaannya.

“Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan kita perlu bekerja sama untuk membantu menjadikannya lebih baik dengan memastikan bahwa setiap orang menikmati hak-hak dasar termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan,



khususnya minoritas,” kata Eva Kusuma Sundari, anggota dewan Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) dan mantan anggota DPR RI.

Isu ini dan isu-isu lainnya dibahas oleh anggota parlemen yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor-Leste, Thailand, Myanmar dan Filipina, yang menghadiri konferensi tahunan Southeast Asia Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (SEAPFoRB) di Jakarta pada 16-17 Oktober 2022.

Konferensi SEAPFoRB diselenggarakan oleh APHR, bersama dengan Panel Internasional Parlemen untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (IPPFoRB), dan merupakan bagian dari inisiatif untuk memperkuat tindakan anggota parlemen untuk mempromosikan dan melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Asia Tenggara.

Pada hari kedua, delapan anggota parlemen mengunjungi gedung MPR/DPR RI untuk melakukan diskusi meja bundar dengan anggota parlemen Indonesia - termasuk Luluk Nur Hamidah, Sylviana Murni, dan Bobby Rizaldi - tentang situasi kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

“Indonesia merayakan enam agama serta banyak kepercayaan yang dianut di sini, tetapi mengingat keragaman yang sangat besar di sini, kami menghadapi tantangan besar untuk terus mengembangkan rasa hormat terhadap pluralitas serta mempertahankan 'Bhinneka Tunggal Ika' yang menjadi semboyan nasional kami. Kami juga menyadari bahwa melindungi kebebasan beragama adalah sesuatu yang membutuhkan respon global,” kata Luluk.

Konferensi diakhiri dengan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi utama, termasuk kebutuhan untuk memberikan kontra-narasi terhadap pesan intoleran di media sosial dan meningkatkan keterlibatan dengan pemangku kepentingan utama lainnya seperti organisasi keagamaan dan masyarakat sipil.

“Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak asasi manusia yang sangat penting untuk dilindungi. Anggota parlemen memiliki peran besar untuk dimainkan dalam memastikan perlindungan itu,” kata anggota parlemen Filipina Arlene Brosas.